

DAFTAR PUSTAKA

- Asito Wojow, *Kamus Bahasa Indonesia*, C.V. Pengarang.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, C.V. Ananta, Semarang, 1994.
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Hamzah Andi, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta 2012,
- Huda Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- L. He. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Saduran oleh Soedjono D. (Jakarta : Rajawaqli, 1984)
- Moeljatno. *"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana"*, Yogyakarta, 1969
- Mulyadi Mahmud, *Criminal Policy dalam Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008)
- Soerjono Soekanto, *"Metode Penelitian Hukum"*, 1986
- Sudarto. *"Hukum pidana I"* , Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Sumitro, *Inti Hukum Acara Pidana*, (Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1994)
- Suriatmadja, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Sutandyo Wignyosoebroto, *Hak-hak Manusia dan Konstituante*, Artikel Kompas 19 Agustus 1996, hlm. 11. Menurut Agus Salim : Kebebasan itu berarti masing-masing dapat menurut kehendaknya dan menurut kehidupan tertentu yang dipilihnya dalam masyarakat. Bachtiar Agus Salim, *Hukum Pidana – Beberapa Catatan Penintetiaire Pecht di Negeri Belanda d di Indonesia* (Jakarta Timur : Fakultas Hukum USU, 1976)

Tri Andrisman, S.H., M.H., "*Hukum Pidana*", Unila, 2009,

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid I (Jakarta Pustaka Kartini, 1993)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Dasar Tahun 1945